



14 Pegawai Disiapkan Rutan

Dari 14 orang itu seharusnya ke Jakarta, namun 10 orang melenceng ke Bogor dan 4 orang ke Singapura.

GIANYAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar akhirnya memproses kasus dugaan korupsi dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas) fiktif yang menyeret 14 tersangka pegawai Dispenda Gianyar. Kasus ini dilidiki Polda Bali sejak pertengahan 2013, lanjut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kajati Bali meneruskan ke Kejari Gianyar karena wilayah kasus ada di Gianyar. Kajari Gianyar Ketut Sumedana SH mengekspose kasus itu kepada awak media di Gianyar, Senin (5/10) siang. Didampingi Kasi Pidsus Herdian Ralfardi SH dan Kasi Intel Ketut Sudiarta SH, Kajari Sumedana mengatakan, kasus itu kini berlanjut ke pe-

nyidikan tahap II dari Polda Bali ke Kejati Bali lanjut ke Kejari Gianyar. Kata dia, berkas kasus sudah P21 (lengkap). "Sesuai berkas, tersangka kasus ini baru 14 orang. Kemungkinan bisa bertambah. Soal ditahan atau tidak, kita lihat nanti," jelasnya.

Ia menambahkan, modus kasus ini, pada 2013 sesuai SPPD, 14 pegawai Dispenda itu sedianya melaksanakan program kegiatan untuk peningkatan PAD ke Jakarta. Namun dari 14 orang itu, 10 orang di antaranya berangkat melenceng ke Bogor untuk kepentingan pribadi dan 4 orang lagi ke Singapura, juga untuk kepentingan pribadi. Dalam berkas berbeda, dari 14 orang itu masih ada empat orang lagi berangkatnya ke Malaysia, bukan ke Jakarta, sebagaimana SPPD pada bulan berbeda 2013. "Atas tindakan ini, Negara dirugikan ratusan juta rupiah," jelasnya.

Sumedana memaparkan, pelimpahan berkas kasus berikuit para tersangka dan barang bukti (BB) dari Polda Bali akan diterima pada 12 Oktober 2015. Rencana ini sesuai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 6



• NUSABALI/WILASA

Didampingi Kasi Pidsus Herdian Rahardi SH dan Kasi Intel Ketut Sudiarta SH, dan jaksa lainnya, Kajari Sumedana (kiri) memaparkan kasus pidana di Kejari Gianyar, Senin (5/10).

Penyidikan) dari Polda Bali ke Kejati lanjut ke Kejari Gianyar. Sementara itu, informasi NusaBali di Gianyar, 14 tersangka tersebut kini tak lagi bertugas di Kantor Dispenda. Mereka sudah bertugas menyebar di kantorkantor di lingkungan Pemkab Gianyar. Dari 14 tersangka itu, beberapa di antaranya berstatus pegawai honorer. "Setahu saya, para pegawai Dispenda Gianyar

yang dipanggil Polda Bali lalu karena kasus itu, sudah tak ada lagi di Dispenda," ujar Kepala Dispenda Gianyar Ketut Astawa Suyasa, saat dihubungi Senin (5/10) malam.

Selain itu, Kejari Gianyar juga meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan kasus dugaan pemanfaatan lahan Provinsi Bali. Kasus ini bermodus pungutan liar dengan memalsu-

kan SK Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata. Kasus ini sesuai Sprindik No Print. 2135/p.1.15/fd.1/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015. Tim penyidik menetapkan tersangka atas nama NPS dan IBNS, keduanya pejabat tingkat Kasubag di Bagian Aset Setda Gianyar. Mereka memalsukan tandatangan bupati memakai stempel untuk menyewakan lahan milik Provinsi Bali kepada pihak lain sekitar 10 hektare lebih dengan lokasi tanah tersebar antara 20 are sampai 1 hektare. Atas tindakan dua tersangka, Negara dirugikan ratusan juta rupiah.

Kejari juga melakukan penyidikan tahap II untuk kasus dugaan korupsi di LPD Desa Pakraman Kerta, Desa Kerta, Payangan, Gianyar. Pelimpahan kasus tahap II berlanjut penahan

Para tersangka akan dilakukan pada Kamis (8/10). Dua tersangka yang akan dilimpahkan yakni juru buku Wayan Rus, dan kolektor tabungan Ni Wayan Jul. Modusnya mereka menggelapkan dana LPD dengan kredit fiktif. Atas tindakan mereka, Negara mengalami kerugian hampir Rp 3,5 miliar.

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015
Hal : 6



Anggota Dewan Khawatir Dana Hibah Tak Cair

DENPASAR, NusaBali
Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2016 DPRD Bali, khawatir belum adanya kepastian aturan undang-undang maupun hukum yang jelas untuk mengatur pencairan dana hibah.

Ketua Pansus APBD 2016 DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana di Denpasar, Senin (5/10), mengatakan pihaknya ada kekhawatiran dana hibah dan bantuan pada kelompok masyarakat dan desa adat di Bali tidak bisa cair.

Ia mengatakan ancaman kecilnya serapan Silpa itu karena baik masyarakat, legislatif dan eksekutif di Bali akan sangat berhati-hati.

"Kalau tidak ada payung hukum yang mengatur, dipastikan akan terjadi banyak Silpa pada APBD Induk 2016," ujarnya.

Menurut Kariyasa, dari kondisi di Bali, kecuali yayasan, sangat sedikit sekali kelompok masyarakat yang memiliki badan hukum. Sementara di sisi lain, desa adat ataupun desa pakraman belum berbadan hukum, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. "Disinilah akan menjadi kendala besar dalam pencairan dana hibah ataupun bantuan tersebut," kata politikus PDIP itu.

Selain itu, kata dia, jika terjadi banyak Silpa, maka dampaknya adalah dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tidak

Menurut Kariyasa, secara umum, kondisi ekonomi nasional sedang melambat. "Pencairan dana hibah bansos yang lancar dipastikan akan berpengaruh positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat," katanya.

Untuk itu, kata dia, dengan adanya kekhawatiran pencairan dana hibah bansos di tahun 2016, hal itu akan menjadi pembahasan dalam rapat gabungan dengan gubernur. Sebelum rapat itu digelar, Pimpinan DPRD Bali menggelar rapat pimpinan di DPRD Bali. "Saat rapat gabungan kami minta penjelasan Sekda Bali mengenai hasil konsultasinya ke Mendagri mengenai Pergub yang akan dijadikan dasar

bisa dicairkan. "Hal itu menunjukkan penyerapan anggaran kurang bagus. Dampaknya jelas terhadap perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat Bali," ucapnya.



pencairan dana hibah dan bansos tahun 2015 ini, dan bagaimana dengan tahun 2016," ujarnya.

Kekhawatiran tidak bisa dicairkan dana hibah dan bansos di tahun 2016, tidak hanya terjadi di Bali melainkan di seluruh Indonesia. Seperti halnya Jawa Timur sampai Rp1 triliun lebih dana hibah dan bansos tidak bisa dicairkan.

"Kami semua berharap agar bantuan hibah dan bansos bisa dicairkan untuk tahun 2016, dan tidak ada yang melanggar hukum, oleh karenanya kita harus perjuangkan peraturan itu agar tidak jadi bulan-bulanan BPK ataupun KPK," kata Kariyasa Adnyana. ant



Atasi Banjir di Kuta, Badung Datangkan Pompa Penyedot Air dari Surabaya

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung mendatangkan pompa penyedot air dari Surabaya, sebagai upaya menanggulangi banjir yang kerap melanda Jalan Dewi Sri, Legian. Proyek pemasangan pompa ini sedang dalam proses pengerjaan. Total proyek ini menelan anggaran Rp 26 miliar.

Tiap kali musim penghujan kawasan rawan banjir di Kuta, salah satunya adalah di Jalan Dewi Sri. Kawasan ini, menurut Kepala Bidang Pengairan Dinas BMP Kabupaten Badung Anak Agung Gde Dalem, merupakan loloan atau daerah buangan air. Namun kini dengan himpitan pembangunan yang kian padat, di sana diperlukan alat untuk membuang air menuju Tukad Mati.

"Dulunya kawasan Jalan Dewi Sri tersebut adalah loloan dan daerah buangan air, tapi seka-

rang perlu bantuan alat untuk membuang air menuju Tukad Mati, sehingga Jalan Dewi Sri bebas dari banjir," kata Gung Dalem—sapaan AA Gde Dalem—, Senin (5/10).

Dinas BMP pun menargetkan pertengahan Desember 2015 proyek pompa penanggulangan banjir tersebut rampung.

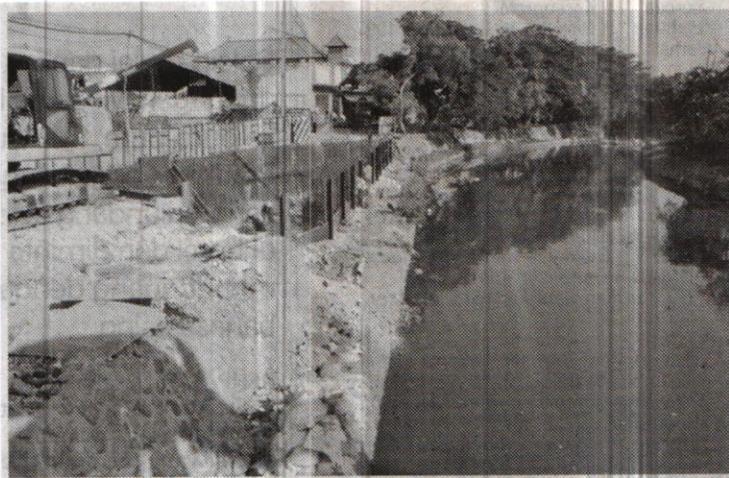
Pompa air untuk penanggulangan banjir didatangkan langsung dari Surabaya. Pompa air ini mampu menyedot air hingga 1.500 liter per detik untuk satu pompa. "Rencananya kami pasang dua pompa, dan kalau tidak ada halangan pengerjaannya bisa rampung pada 11 Desember 2015," imbuhnya.

Proyek ini erat kaitannya dengan mega proyek pengentasan masalah banjir di kawasan Kuta. Program prioritas Pemkab Badung ini berbarengan dengan proyek normalisasi Tukad Mati

yang sekarang sedang berjalan. "Program ini untuk mengentaskan banjir di Kuta secara komprehensif," kata Gung Dalem.

Dikatakan, normalisasi yang sudah dilakukan yakni dengan melakukan pengerukan sedimentasi di hulu sungai dan di hilir. "Tukad Mati kami normalisasi dari hulu hingga ke hilir. Di hulu kami sudah melakukan pengerukan sedimentasi, sedangkan di hilir sudah melakukan pembangunan long storage," imbuh Gung Dalem sembari menyebutkan proyek pembangunan pompa pengendali banjir Jalan Dewi Sri tersebut nantinya akan berada di bawah jalan dengan lebar ruangan 4 meter dan panjang 6 meter.

Gung Dalem menambahkan, proyek yang dikerjakan oleh PT Tri Jaya Nasional tersebut ditarget berakhir pada 11 Desember 2015. Sayangnya, hingga saat



• NUSABALI/YUDA

PEKERJA sedang membangun tempat untuk pompa penyedot air di pinggir Tukad Mati yang berada di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, untuk mengatasi banjir yang kerap datang saat musim hujan, Senin (5/10).

ini proyek tersebut mengalami progress yang melambat yakni tercatat minus 0,84 persen. Meski begitu, pihaknya optimis-

tis proyek dapat selesai tepat waktu. "Kami tinggal menunggu pompanya dari Surabaya," tandasnya. **as**

Edisi : seksa, 6 Oktober 2015

Hal : 2



Pencairan Dana Bantuan Adat Tarik Ulur

Progam Desa Pakraman

Terancam Mandeg

Dari 169 desa pakraman, Pemprov Bali baru cairkan dana BKK kepada sekitar 30 desa dan tak serta merta bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak adat.

SINGARAJA, NusaBali

Dana bantuan keuangan khusus (BKK) bagi masing-masing Desa Pakraman se Buleleng sebesar Rp 200 juta, hingga memasuki bulan Oktober tahun 2015 ini, ternyata belum ada yang bisa dimanfaatkan. Sejumlah program adat pun tidak bisa terlaksana.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara perwakilan adat dengan perwakilan desa dinas yang difasilitasi oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di ruang pertemuan Kantor Bupati, Senin (5/9) pagi. Perwakilan adat diwakili oleh Prajuru Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) bersama Prajuru Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), sedangkan dari pihak desa dinas diwakili oleh pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa/Lurah (Forkomdeslu).

Pertemuan itu juga melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Buleleng dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD).

Di Buleleng tercatat ada se-

banyak 169 Desa Pakraman. Terungkap dalam pertemuan kemarin, dari 169 Desa Pakraman, Pemprov Bali baru mencairkan dana BKK kepada sekitar 30 Desa Pakraman di Buleleng. Hanya saja, sejauh ini dana yang sudah dicairkan tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak adat.

Masalahnya, antara Desa Pakraman dengan Desa Dinas masih terjadi silang pendapat soal ketentuan pengelolaan dana tersebut. Pihak Desa Pakraman minta agar dana yang sudah dicairkan oleh Provinsi melalui rekening Desa Dinas, agar bisa diserahkan

ke adat agar secepatnya dimanfaatkan.

“Keinginan itu mengacu pada pola pengelolaan tahun sebelumnya, dimana dana BKK itu langsung bisa dimanfaatkan oleh pihak Desa Pakraman.

“Kami belum bisa memanfaatkan, jelas program-program kami belum ada terlaksana. Pasraman Remaja sama sekali belum ada yang terlaksana, kegiatan fisik juga tersendat,” terang Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Desa Putu Budarsana.

Sedangkan dari pihak Desa Dinas belum berani mencair-

kan dana BKK tersebut, kendati sudah masuk ke rekening desa. Masalahnya, dana tersebut kini harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai dengan Permendagri bernomor; 113 Tahun 2014. Celakanya, untuk memasukkan BKK tersebut ke APBDes, harus menunggu APBDes Perubahan yang diperkirakan baru mulai disusun oleh masing-masing desa dinas pada bulan Nopember mendatang.

“Kami tidak ada maksud menahan dana tersebut. Tapi ini karena regulasi yang mengharuskan pen-

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 4



SAMBUNGAN - - -



BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana fasilitasi pertemuan antara MMDP dengan Forkomdeslu terkait persoalan BKK Provnsi.

gelolaan dana itu harus mengacu pada pada APBDes,” terang Ketua Forkomdeslu I Made Suteja.

Sementara Plt Kepala BPKAD Buleleng Bimantara menyatakan, situasi itu terjadi akibat perbedaan pandangan dalam pengelolaan dana tersebut. Perbedaan itu terjadi akibat ada dua regulasi yang sama-sama dijadikan acuan. Pihak Desa Pakraman tetap mengacu pada regulasi lama yakni Permendagri nomor 34 Tahun 2007, sehingga BKK tersebut bisa langsung diserahkan oleh Desa Dinas kepada Desa Pakraman.

Namun Desa Dinas, kini mengacu pada regulasi Permendagri nomor 113 Tahun 2014, dimana dana tersebut harus masuk dalam APBDes. “Desa Pakraman memandang regulasi yang lama dipakai karena SK Gubernur men-

yatakan dana BKK itu diberikan kepada Desa Pakraman, bukan kepada Desa Dinas. Tetapi disisi lain, dalam pengelolaannya harus mengacu pada regulasi yang terbaru dimana harus masuk dalam APBDes,” terang Bimantara.

Terkait persoalan tersebut, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana langsung menugaskan Asisten III Setkab Buleleng Ketut Asta Semadi, BPKAD serta BPMPD mengkonsultasi ke Provinsi dengan mengajak perwakilan dari MMDP dan Forkumdeslu. “Agar ini cepat klir, kita harus konsultasikan ke Provinsi. Acuan mana yang harus dipakai, ini harus dijelaskan provinsi, agar dibawah tidak ada kebingungan,” tegasnya. Rencananya rombongan yang dipimpin Asisten III, akan berkonsultasi ke Provinsi, Selasa (6/9) hari ini. **k19**

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal : 4